

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI - DANA DESA DI DESA CIPARAY KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN CIAMIS

Dadan Chandra Gunawan

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: dadanchandra54@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa di Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis antara lain sebagai berikut, bahwa belum tercapainya ketepatan sasaran program akibat dari proses pendataan penerima BLT-DD dan juga dalam hal memperbaharui DTKS yang belum optimal mengakibatkan terjadinya pembagian bantuan yang tumpang tindih ataupun dobel bantuan, sosialisasi terkait Program BLT-DD oleh pemerintah desa belum maksimal dilakukan sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Program BLT-DD. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa di Desa Ciparay berdasarkan hasil penelitian diketahui belum berjalanan dengan efektif, belum tercapainya ketepatan sasaran program akibat dari proses pendataan penerima BLT-DD dan juga dalam hal memperbaharui DTKS yang belum optimal mengakibatkan terjadinya pembagian bantuan yang tumpang tindih ataupun dobel bantuan, sosialisasi terkait Program BLT-DD oleh pemerintah desa belum maksimal dilakukan sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Program BLT-DD, sarana dan prasarana saat pelaksanaan pembagian bantuan yang belum memadai, peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang belum optimal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu dengan semakin seringnya melakukan musyawarah khususnya saat akan melakukan sebuah program termasuk program BLT-DD dan berupaya sering memperbaharui DTKS semaksimal mungkin, membantu pemimpin-pemimpin disetiap lingkungan agar berupaya lebih sering melakukan sosialisasi dengan melakukan metode khusus sehingga tetap bisa dilakukan walaupun sedang dalam masa pandemi Covid-19 khususnya Program BLT-DD, menyiapkan tempat khusus untuk pelaksanaan pembagian BLT-DD yang nyaman, pemerintah desa akan berusaha menciptakan suatu kegiatan ataupun lapangan kerja khusus yang mana akan merekrut banyak masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat.

Kata Kunci : *Efektivitas, Program, Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengangguran saat ini masih menjadi masalah yang sangat penting di Indonesia untuk bisa ditangani, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah mengenai kemiskinan dan pengangguran ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana ini berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang masih merupakan Negara berkembang.

Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang harus dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan, membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya penduduk Indonesia yang mengalami pengangguran. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada dan selalu meningkat setiap tahunnya.

Kenaikan jumlah dan presentasi penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan

oleh adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada Agustus 2020. Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia 1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT2 dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi.

Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini

menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial.

Dalam jangka panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan.

Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Dimasa Pandemi Covid-19 ini tentu akan semakin membuat masyarakat merasa kesusahan untuk itu Pemerintah sudah berupaya dengan segala cara dan juga mengeluarkan berbagai skema bantuan untuk bisa membantu masyarakat yang

terdampak Covid-19. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya:

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang”.

Banyak program yang inovatif telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah agar bisa memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia yaitu pandemi covid-19 yang saat ini sedang menjadi masalah besar untuk Negara Indonesia bahkan dunia. Masalah mendasar selama ini dan juga saat Pandemi Covid-19 sekarang ini

adalah kesejahteraan social. Salah satu program pemerintah untuk bisa mengurangi beban masyarakat yakni dengan membuat Program Bansos (bantuan social), yang mana tujuannya ini untuk membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sehingga bisa meringankan beban masyarakat terutama di masa Pandemic Covid-19 yang membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Pemerintah kemudian mengalokasikan Dana sebesar Rp.695,2 triliun untuk bisa menangani pandemi covid-19 pada tahun 2020. Dana ini dikucurkan untuk berbagai macam sektor, salah satunya yaitu untuk bantuan sosial sebesar Rp.203,9 triliun. Bantuan sosial yang dimaksud seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Santunan Kematian, Bantuan Sosial Tunai (BST) Bantuan Sembako dan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) untuk meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Melalui berbagai macam proses dan perencanaan yang matang sehingga beberapa program bantuan tersebut bisa menjadi solusi permasalahan sosial-ekonomi masyarakat dan juga berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut; Bagaimana Efektivitas pelaksanaan program BLT-DD di Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

KAJIAN PUSTAKA

1. Efektifitas

Menurut Kurniawan (2008), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Sedangkan menurut William N. Dunn (2005:498) efektivitas (effectiveness) adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Efektivitas juga berarti sebagai sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu usaha ataupun kegiatan tertentu yang dilakukan untuk dapat mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "KBBI" merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, secara sederhananya pelaksanaan bisa diartikan sebuah penerapan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau

usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan suatu rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya. Menurut Mazmanian dan Sebatier (2014:68) mengatakan bahwa “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”.

Menurut Wiestra, dkk (2014:21) :

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”.

3. Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT_DD) merupakan pengembangan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan

adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai.

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) :

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster.

4. Program

Program merupakan pernyataan yang berisi tentang kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling ketergantungan dan saling terkait, untuk bisa mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan. Menurut Jones (1984), menyatakan bahwa “program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan”. Dari pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 (orang) yang terdiri dari 1 (orang) Sekertaris Desa Ciparay , 1 (orang) Ketua BPD Desa Ciparay dan 2 (orang) masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketepatan sasaran program

a. Strategi Pemerintah Desa dalam menentukan penerima BLT-DD

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa straregi pemerintah Desa Ciparay dalam menentukan penerima BLT-DD adalah dengan cara musyawarah namun belum optimal, hal tersebut terlihat dengan adanya kesalahan dalam pendataan yang mengakibatkan pembagian bantuan kepada masyarakat ada yang mendapatkan dobel bantuan atau bisa dikatakan tumpang tindih. Akibat dari kesalahan dalam melakukan pendataan tersebut mengakibatkan pelaksanaan program kurang optimal. Adapun hambatan yang dihadapi dalam strategi pemerintah Desa Ciparay untuk menentukan penerima BLT-DD tersebut yaitu dalam pelaksanaan musyawarahnya tidak semua pihak terkait ikut hadir sehingga

menyebabkan terjadinya permasalahan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciparay dan pihak-pihak yang terlibat dalam program ini yaitu dengan seringnya melakukan musyawarah bersama dengan mengupayakan semua pihak hadir khususnya saat akan melakukan pembagian BLT-DD sehingga bisa mengurangi resiko salah pendataan yang menyebabkan terjadinya salah sasaran dalam Program BLT-DD tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui ketepatan sasaran program dilihat dari indikator strategi pemerintah desa dalam menentukan penerima BLT-DD bahwa strategi yang dilakukan yaitu dengan melakukan musyawarah belum berjalan dengan efektif. Pada saat pelaksanaan musyawarah tersebut seringkali tidak semua pihak terkait ikut hadir sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan.

b. Pemerintah desa harus sering melakukan pendataan dalam memperbaharui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Pemerintah Desa Ciparay dalam melakukan pembaharuan DTKS ini belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya kesalahan dalam pembagian bantuan sebagai akibat dari Pemerintah Desa yang jarang memperbaharui DTKS yang mengakibatkan saat berjalannya program BLT-DD tersebut ada beberapa masyarakat yang

mendapatkan dobel bantuan atau bisa dikatakan tumpang tindih.

Adapun hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Ciparay dalam memperbaharui DTKS ini adalah dalam melakukan Pembaharuan DTKS ini tidak mudah dan memerlukan cukup waktu. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciparay sekarang ini adalah dengan berupaya sering memperbaharui DTKS ataupun melakukan pendataan semaksimal mungkin dan seakurat mungkin hingga apabila ada bantuan-bantuan lainnya akan mengurangi resiko terjadinya kesalahan yang tentunya akan membuat program tersebut berjalan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui ketepatan sasaran program dilihat dari indikator strategi dalam memperbaharui DTKS ini belum efektif.

2. Sosialisasi Program

a. Strategi Pemerintah Desa dalam melakukan sosialisasi terkait program BLT-DD kepada masyarakat

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi Program BLT-DD tersebut belum maksimal, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang kurang bahkan tidak mengetahui terkait program bantuan tersebut yang mana menunjukkan masih sangat rendahnya pengetahuan masyarakat terkait Program BLT-DD tersebut. Masih banyak masyarakat di Desa Ciparay yang belum paham terkait darimana

Program BLT-DD tersebut serta tujuan dari program bantuan tersebut bahkan ada penerima BLT-DD tersebut yang belum memahami terkait program bantuan tersebut.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah kurangnya peran pemimpin lingkungan warga yaitu Rt dan Rw dalam melakukan sosialisasi kepada setiap warganya terkait program BLT-DD tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciparay dan pihak-pihak yang terlibat dalam program ini yaitu dengan membantu pemimpin-pemimpin disetiap lingkungan agar berupaya lebih sering melakukan sosialisasi dengan melakukan metode khusus sehingga tetap bisa dilakukan walaupun sedang dalam masa pandemi Covid-19 khususnya Program BLT-DD sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui sosialisasi program dilihat dari indikator Strategi Pemerintah Desa dalam melakukan sosialisasi terkait program BLT-DD belum berjalan secara efektif. Sosialisasi merupakan sebuah langkah awal saat akan melaksanakan sebuah program dan sangat penting sekali agar masyarakat khususnya yang menerima bantuan tersebut mengetahui terkait program bantuan yang mereka dapatkan.

b. Pemerintah desa memberikan pemahaman terkait penggunaan uang BLT-DD agar bisa benar-benar bermanfaat

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pemberian pemahaman terkait penggunaan dana BLT-DD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciparay telah dilakukan dengan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan melalui sosialisasi terkait pemahaman penggunaan dana BLT-DD yang sudah dilakukan kepada masyarakat oleh pihak Pemerintah Desa Ciparay pada saat pembagian dana BLT-DD. Lalu kemudian dapat dilakukan proses wawancara kepada Pemerintah Desa Ciparay dan masyarakat hingga dapat mengambil kesimpulan dari hasil data sehingga dapat dijadikan informasi yang akurat dan jelas dengan hasil mendapatkan informasi dari pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi sosialisasi program dilihat dari indikator pemberian pemahaman terkait penggunaan uang BLT-DD agar bisa benar-benar bermanfaat sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan rata-rata jawaban responden yang menunjukkan Pemerintah Desa Ciparay sudah melakukan pemberian pemahaman terkait penggunaan Dana BLT-DD sudah sesuai dengan yang seharusnya.

3. Tujuan Program

a. Strategi Pemerintah dalam memaksimalkan penyaluran

Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa agar tidak salah sasaran dan tumpang tindih

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa strategi dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD ini belum dilakukan dengan cukup baik, hal tersebut bisa dibuktikan melalui musyawarah yang sering dilakukan setiap ada kegiatan namun pada saat pelaksanaan musyawarah sebelum program ini berjalan tidak semua pihak terkait ikut hadir sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi tujuan program dilihat dari indikator strategi pemerintah dalam memaksimalkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa memang sudah dilakukan yaitu melalui musyawarah bersama antara Pemerintahan desa, bpd, kepala dusun serta Rt dan Rw namun belum efektif karena pada saat pelaksanaan musyawarah sebelum program ini berjalan tidak semua pihak terkait ikut hadir sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan.

b. Peran Pemerintah desa dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang sangat terdampak Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Tujuan Program pada indikator ke satu yaitu menentukan penerima bantuan sudah dilakukan namun belum berjalan secara efektif sesuai dengan rata-rata jawaban responden yang

menunjukkan bahwa dalam menentukan penerima bantuan ini dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak Pemerintah desa Ciparay, BPD desa Ciparay, kepala dusun, Rt dan Rw. Lalu untuk indikator yang ke dua terkait peran Pemerintah desa dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat masih belum dilaksanakan secara efektif. Dalam indikator ini ditemukan adanya hambatan dalam peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang mana pemerintah desa belum bisa menemukan suatu solusi terkait program ataupun kegiatan khusus yang bisa memberikan pendapatan lebih kepada masyarakat. Pemerintah desa untuk saat ini hanya membantu dalam pembagian bantuan-bantuan lain dari pemerintah pusat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Ciparay untuk meminimalisir hambatan dengan yaitu dengan akan berusaha menciptakan suatu kegiatan ataupun lapangan kerja khusus yang mana akan merekrut banyak masyarakat dan bisa dijadikan program baru ke dalam Bumdes yang mana diharapkan usaha ini akan bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang melemah akibat adanya Pandemi Covid-19.

4. Pemantauan Program

a. BPD melakukan pemantauan terkait pelaksanaan Program BLT-DD

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui

bahwa strategi BPD dalam pelaksanaan pemantauan Program BLT-DD ini sudah dilakukan dengan cukup baik, hal tersebut bisa dibuktikan dengan selalu adanya keterlibatan dari pihak BPD Desa Ciparay yang selalu mendampingi disetiap kegiatan Program BLT-DD.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pemantauan program dilihat dari indikator BPD melakukan pemantauan terkait pelaksanaan Program BLT-DD ini sudah dilaksanakan dengan efektif yang mana pihak BPD selalu berupaya untuk ikut terlibat aktif dalam Program BLT-DD terutama dari mulai pendataan, lalu pada saat penyaluran BLT-DD tersebut dan yang paling penting dengan melakukan pemantauan setelah dilakukannya penyaluran BLT-DD tersebut.

b. Staregi Pemerintah desa dalam melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Program BLT-DD

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa strategi pemerintah desa Ciparay dalam melakukan evaluasi terkait Program BLT-DD ini sudah dilakukan dengan baik, hal tersebut bisa dibuktikan dengan keterbukaan apabila ada yang ingin memberikan saran dan keluhan terkait Program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Ciparay.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pemantauan program dilihat dari indikator staregi pemerintah desa dalam melakukan evaluasi terkait

program bantuan tersebut sudah berjalan secara efektif. Pemerintah desa dalam melakukan evaluasi tersebut dengan cara menampung dan mendengarkan apapun dari masyarakat dan juga pihak-pihak terkait yang terlibat dalam Program BLD-DD tersebut baik dalam berupa masukan-masukan, saran-saran bahkan keluhan yang tentunya selalu ada terutama dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Evaluasi adalah pengukuran atau perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang telah direncanakan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa di Desa Ciaparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan namun belum berjalan dengan optimal.

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa di Desa Ciaparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis sebagian besar telah dilaksanakan dengan memenuhi kriteria untuk mengukur Efektivitas suatu Program menurut Subagyo (Budiani,2007:53) yang terdiri dari 4 dimensi yaitu Ketetapan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program. 4 dimensi tersebut telah penulis jadikan alat ukur dalam penelitian yang masing-masing memiliki indikator, dari

4 dimensi ada 8 indikator untuk mengukur Efektivitas suatu program. Dari 4 dimensi tersebut belum ada dimensi yang sudah dilaksanakan secara optimal. Yang mana dari 8 indikator tersebut hanya 3 yang dikatakan optimal dan 5 lagi masih belum optimal. Indikator yang belum optimal yaitu indikator strategi pemerintah desa dalam menentukan penerima BLT-DD, yaitu dengan terjadinya pembagian bantuan yang tumpang tindih ataupun dobel bantuan.

Pada indikator strategi pemerintah desa melakukan pendataan dalam memperbaharui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yaitu dengan terjadinya kesalahan dalam pembagian BLT-DD karena dalam melakukan pembaharuan DTKS ini tidak mudah dan memerlukan cukup waktu. Lalu indikator strategi pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi terkait program BLT-DD, yaitu pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara khusus kurangnya sosialisasi yang diterima oleh masyarakat juga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kurang bahkan tidak mengetahui terkait program BLT-DD. Yang terakhir indikator peran pemerintah desa dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu kurangnya kreativitas dari Pemerintah Desa Ciaparay dalam membuat atau menciptakan suatu usaha ataupun kegiatan pekerjaan yang bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Dunn, N William, 2005, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kurniawan, Lutfi J dan Mochamad Najib (ed), 2008. *Efektivitas Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*, In-Trans Publishing, Malang.

Imawan, Wynandin, 2008, *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*, Bappenas, Jakarta.

Sebatier dalam Solihin, 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah.

Wiestra, dkk 2014. *Pelaksanaan adalah usaha-usaha*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona.